

# **KONTRADIKSI PERKAWINAN PELAKU DENGAN KORBAN PERKOSAAN DALAM PERSPEKTIF PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA**

**Arinal Achsana**

## **ABSTRAK**

Praktik menikahkan pelaku dan korban perkosaan seringkali dilakukan masyarakat Indonesia untuk menyelesaikan kasus perkosaan serta sebagai bentuk tanggung jawab pelaku terhadap korban. Adanya pelabelan terhadap korban perkosaan serta sulitnya korban untuk memperoleh keadilan membuat kebanyakan korban perkosaan memilih untuk menerima bentuk tanggung jawab tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontradiksi pernikahan pelaku dan korban perkosaan serta bagaimana seharusnya pelaku perkosaan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif, dengan menelaah peraturan perundang-undangan mengenai perkosaan lalu dikaitkan dengan kebiasaan masyarakat dalam menyelesaikan kasus perkosaan. Dari penelitian ini ditemukan hasil bahwa menikahkan pelaku dan korban perkosaan akan membuat korban mengalami penderitaan yang lebih besar dan malah menjadi alasan pelaku agar terbebas dari jerat hukum. Praktik pernikahan ini bertentangan dengan konsep pertanggungjawaban pidana serta merupakan fenomena pelanggaran hukum. Praktik pernikahan pelaku dan korban perkosaan merupakan pelanggaran terhadap Pasal Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pelaku perkosaan seharusnya menjalani pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

***Kata Kunci:*** *Perkosaan, Kontradiksi, Pertanggungjawaban Pidana, Perkawinan Paksa*

**MARITAL CONTRADICTION OF PERPETRATORS AND RAPE VICTIM  
IN THE PERSPECTIVE OF CRIMINAL LIABILITY**

**Arinal Achsana**

**ABSTRACT**

*The practice of marrying perpetrators and victims of rape is often carried out in Indonesian society as a way to resolve rape cases and as a form of responsibility by the perpetrator towards the victim. The labeling of rape victims and the difficulty for victims to obtain justice lead many rape victims to choose to accept this form of responsibility. This study aims to understand the contradiction of marrying perpetrators and victims of rape and how perpetrators should be held criminally accountable for their actions. The study is conducted using a normative juridical method, examining legislation regarding rape and linking it to societal practices in resolving rape cases. The research findings reveal that marrying perpetrators and victims of rape leads to further suffering for the victims and serves as an excuse for the perpetrators to escape legal consequences. This marriage practice contradicts the concept of criminal accountability and constitutes a phenomenon of legal violation. The practice of marrying perpetrators and victims of rape violates Article 10 paragraph (2) of the Law on Criminal Acts of Sexual Violence. Perpetrators of rape should be held criminally accountable as stipulated in Article 285 of the Criminal Code and Article 6 letter c of the Law on Criminal Acts of Sexual Violence.*

**Keywords:** *Rape, Contradiction, Criminal responsibility, Forced Marriage*